

9 Proyek Jalan di Kaltara Tetap Berjalan

**9 PROYEK JALAN DI KALTARA
YANG TELAH BERJALAN, TAHUN ANGGARAN 2020.**

- **Pembangunan Jalan Seputuk Malinau Kota**
 - Nilai Kontrak : Rp 17,6 Miliar
 - Sumber : APBD Kaltara
- **Pembangunan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan-Pelabuhan Ferry Ancam**
 - Nilai Kontrak : Rp 2,9 Miliar
 - Sumber : APBD Kaltara
- **Pembangunan Saluran Drainase dan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Mantunggal Tanjung Selor**
 - Nilai Kontrak : Rp 480 Juta
 - Sumber : APBD Kaltara
- **Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan Ruas Jalan Mamolo-Sei, Mangkudu-Sei, Banjar**
 - Nilai Kontrak : Rp 14,7 Miliar
 - Sumber : APBD Kaltara
- **Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Selimau I-Selimau III**
 - Nilai Kontrak : Rp 1,4 Miliar
 - Sumber : APBD Kaltara
- **Peningkatan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan-Pelabuhan Ferry Ancam**
 - Nilai Kontrak : Rp 16,3 Miliar
 - Sumber : DAK Reguler
- **Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan-Tidung Pale**
 - Nilai Kontrak : 10,6 Miliar
 - Sumber : DAK Penugasan
- **Peningkatan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Bawan-Lembudud**
 - Nilai Kontrak : Rp 16,8 Miliar
 - Sumber : DAK Penugasan
- **Peningkatan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Rungan-Lang Padi**
 - Nilai Kontrak : Rp 7,5 Miliar
 - Sumber : DAK Penugasan

Sumber : DPUPR-Perkim Kaltara, Bidang Bina Marga, Mei 2020.

intopubdok kaltara | humas.kaltaraprov.go.id | pemprovkaltara | kaltaraprov | kaltaraprov



<https://humas.kaltaraprov.go.id/>

Meski di tengah bencana non alam, yaitu pandemik Covid-19, kegiatan infrastruktur khususnya proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tetap berjalan. Sesuai informasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim)¹ Kaltara, ada 9 paket kegiatan dari Bina Marga yang saat ini telah berjalan.

Dari 9 paket tersebut, 4 paket bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 5 paket bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, meski tetap fokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga tidak mengesampingkan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur. Utamanya infrastruktur yang memang penting untuk masyarakat. Salah satunya jalan.

Mendampingi Gubernur, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Sunardi menyebutkan, empat paket kegiatan melalui DAK Reguler maupun Penugasan tersebut, yakni peningkatan jalan ruas jalan Trans Kalimantan-Pelabuhan Ferry Ancam (DAK Reguler) dengan nilai kontrak Rp 16,3 miliar, pemeliharaan berkala jalan ruas jalan Trans Kalimantan-Tideng Pale (DAK Reguler) dengan nilai kontrak Rp 10,6 miliar, peningkatan jalan perbatasan ruas jalan

¹Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Long Bawan-Lembudud (DAK Penugasan) dengan nilai kontrak Rp 16,8 miliar, dan peningkatan jalan perbatasan ruas jalan Ling Rungan-Long Padi (DAK Penugasan) dengan nilai kontrak sebesar Rp 7,5 miliar.

Sedangkan 5 paket melalui APBD Kaltara, ada pembangunan jalan Seputuk Malinau Kota Rp 17,6 miliar, pembangunan jalan ruas jalan Trans Kalimantan-Pelabuhan Ferry Ancam dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,9 miliar, pembangunan saluran drainase dan dinding penahan tanah ruas jalan Manunggal Tanjung Selor dengan nilai kontrak Rp 480 juta, pembangunan jalan lingkar Pulau Nunukan ruas jalan Mamolo-Sei Menkadu-Sei Banjar dengan nilai kontrak Rp 14,7 miliar, dan pemeliharaan jalan ruas jalan Selimau I-Selimau III dengan nilai sebesar Rp 1,4 miliar.

“Seluruh paket tersebut saat ini telah berjalan, dengan tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan. Dimana prosedur kesehatan tersebut telah dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) di setiap lokasi pengerjaan,” kata Sunardi. Lebih jauh, terkait proyek pembangunan jalan menuju pelabuhan Ferry Ancam di Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Tahun ini lewat DAK, kembali dilakukan peningkatan berupa pengaspalan terhadap jalan sepanjang 4,9 kilometer. Serta dibantu dengan APBD Kaltara, juga dilakukan pengaspalan dengan panjang efektif 850 meter dengan lebar badan jalan 6 meter.

Akses jalan ini dibangun secara bertahap dimulai sejak 2015. Di mana, tahap pertama melalui APBD dianggarkan Rp 14,5 miliar untuk perbaikan dan peningkatan jalan sepanjang 1,35 kilometer. Kemudian pada 2016, kembali dianggarkan Rp 6,6 miliar, lalu di 2017 Rp 3,5 miliar, pada 2018 Rp 1,4 miliar. Dan di 2019 melalui DAK dianggarkan sebesar Rp 10,4 miliar. “Tahun kemarin jalan dari Pelabuhan Fery ke Jalan Trans Kalimantan sudah sampai agregat. Tahun ini pengerjaannya berupa pengaspalan. Sehingga insya Allah akhir tahun nanti jalan penghubung ke Pelabuhan ferry ini akan mulus,” imbuh Gubernur.

Ada juga, lanjut Sunardi, pembangunan jalan Seputuk menuju Malinau Kota. Dimana tahun ini melalui APBD Kaltara akan dilakukan sejumlah pekerjaan. Yakni galian dan timbuan pada jalan sepanjang 1,2 kilometer dengan lebar badan jalan 30 meter. “Selain pembangunan, ada juga pemeliharaan berkala terhadap ruas jalan Trans Kalimantan-Tidung Pale. Pengerjaannya berupa pengaspalan pada jalan sepanjang 2,8 kilometer dengan lebar badan jalan 6 meter,” jelas Sunardi yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Yusran.

Kemudian, peningkatan jalan perbatasan ruas jalan Long-Bawan-Lembudud juga pengaspalan pada jalan sepanjang 2 kilomter dengan lebar badan jalan 6 meter. Dilanjutkan, peningkatan jalan ruas jalan Long Rungan-Long Padi yakni berupa Lapen Macadam atau perkerasan jalan sepanjang 2 kilometer dengan lebar badan jalan 5,5 meter. Dan, peningkatan jalan Lingkar Pulau Bunyu Nunukan Ruas Jalan Mamolo-Sei Mamolo-Sei Mengkudu-Sei Banjar sepanjang 3 kilometer dengan lebar 6 meter dilakukan lapis pondasi Agregat Kelas B, serta pemeliharaan ruas jalan Selimau I hingga Selimau III. “Pengerjaannya sama, yakni lapis pondasi Agregat Kelas B di jalan sepanjang 3 kilometer dengan lebar badan jalan 6 meter,” tuturnya.

Yusran menambahkan, pada 2020, dari total paket DAK yang ada di Bina Marga, 4 paket DAK tetap dilanjutkan dan 1 paket DAK dibatalkan karena belum berkontrak dan dialihkan pada kegiatan penanggulangan covid-19. Hal ini merujuk pada Edaran Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Nomor : S-247/MK.07/2020, perihal Penghentian Proses Pengadaan

Barang/Jasa DAK Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020. Saat edaran tersebut keluar, 4 paket DAK ini telah berkontrak, bahkan sudah ada paket yang berjalan. Sehingga berdasarkan edaran Menkeu, terhadap paket DAK yang telah berkontrak dan yang telah berjalan tersebut tetap dilanjutkan.

“Alhamdulillah dari 5 paket DAK yang ada di Bina Marga, 4 paket tetap dilanjutkan, dan hanya 1 paket yang dibatalkan pelaksanaannya. Ini karena kita melakukan tender lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat selesai sebelum pemerintah melalui Menkeu mengeluarkan edaran perihal penghentian proses pengadaan barang/Jasa DAK Fisik 2020 akibat mewabahnya Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia,” tutup Yusran.

Sumber Berita :

- Kaltara.antaranews.com; 9 Proyek Jalan Tetap Berjalan; 12 Mei 2020;
- Kaltim.tribunnews.com; 9 Proyek Jalan di Kaltara Tetap Berjalan, Pelabuhan Ferry – Trans Kalimantan Ditarget Mulus 2020; 12 Mei 2020.

Catatan :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
- Pada akhir Desember 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020. Perpres Nomor 88 Tahun 2019 ini merupakan ketentuan pelaksanaan Pasal 12 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020.
- DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi. DAK Fisik tersebut terdiri atas bidang Pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, industri kecil dan menengah, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, jalan, air minum, sanitasi, irigasi, pasar, lingkungan hidup dan kehutanan, transportasi perdesaan, transportasi laut dan sosial.
- Kriteria Pengalokasian DAK :
 - a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah;
 - c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.